

# RASIONALISASI ANGGARAN PENERJEMAHAN AL-QURAN BAHASA DAERAH

Nurrahmah

Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama

[rahmahuseinkemenag@gmail.com](mailto:rahmahuseinkemenag@gmail.com)

## *Executive Summary*

Policy Brief ini bertujuan untuk membahas dan menganalisa masalah struktur anggaran penerjemahan al-quran bahasa daerah yang belum maksimal. Akibatnya muncul beberapa persoalan penting, misalnya hasil terjemahan yang masih terdapat kesalahan, seperti kasus penerjemahan bahasa Madura yang teks al-qurannya terdapat kesalahan, bahasa Minang pada covernya dan isinya terjemah Batak, kesalahan typo, inkonsistensi, terjemahan yang sama pada teks al-quran yang berbeda pada al-quran terjemah bahasa Cirebon, Bima dan Tolaki. Hal ini disebabkan karena pembahasan hasil terjemah, proses editing, honor validator yang belum maksimal yang disebabkan struktur anggaran yang belum mampu mengcover kebutuhan penerjemahan. Oleh sebab itu, policy brief ini bertujuan agar Puslitbang LKKMO dapat melakukan rasionalisasi anggaran agar kegiatan penerjemahan dapat menghasilkan produk yang berkualitas.

## A. Pendahuluan

Penerjemahan al-quran bahasa daerah adalah salah satu program prioritas Puslitbang LKKMO dalam rangka memberikan layanan keagamaan bagi umat Islam agar lebih dekat dengan al-quran karena al-qurannya diterjemahkan dengan menggunakan bahasa ibu. Di sisi lain, kegiatan ini merupakan Amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang salah satu unsurnya adalah bahasa local.

Sejauh ini, Puslitbang LKKMO sudah melakukan kerjasama dengan 28 Perguruan Tinggi Agama Islam di seluruh Indonesia untuk menerjemahkan al-quran bahasa daerah, dan sebanyak 24 bahasa daerah sudah diterbitkan dan disebarluaskan kepada masyarakat. Dalam perjalanannya kegiatan penerjemahan ini, banyak mengalami persoalan. Diantaranya adalah hasil terjemahan yang masih terdapat kesalahan (Kasus penerjemahan bahasa Madura, bahasa Minang pada covernya dan isinya terjemah Batak, kesalahan typo, inkonsistensi, terjemahan yang sama pada teks al-quran yang berbeda pada al-quran terjemah bahasa Cirebon, Bima dan Tolaki).

Persoalan ini disebabkan karena keterbatasan anggaran yang dimiliki Puslitbang LKKMO sehingga belum mampu memberikan jadwal sidang-sidang/FGD yang lebih banyak untuk membahas hasil terjemahan secara maksimal. Di sisi yang lain, kecilnya honor validator karena tidak ada dalam Standar Biaya Masukan (SBM), tidak adanya honor editor, layouter, desain grafis membuat hasil terjemahan tidak maksimal.

Policy brief ini mengangkat isu mengenai pentingnya melakukan rasionalisasi anggaran kegiatan terjemah al-quran bahasa daerah dan mengusulkan alternatif solusi atas persoalan tersebut.

## B. Deskripsi Masalah

Penerjemahan al-quran ke dalam bahasa daerah, memiliki persoalan yang sangat krusial. Pertama, persoalan keterbatasan anggaran. Al-quran yang terdiri dari 30 juz memiliki tantangannya sendiri, baik dari teks al-qurannya sendiri yang harus dijaga dari kesalahan, maupun dari hasil terjemahannya yang harus disesuaikan agar tidak bertentangan dengan kaidah bahasa dan tradisi masyarakat pengguna. Untuk sampai pada capaian ini, diperlukan pembahasan hasil terjemahan sebanyak 6 kali dalam setahun, sedangkan kemampuan anggaran PLKKMO sangat terbatas. Kedua, dalam alur penerjemahan, terdapat 1 alur yang pembiayaan honorinya tidak termaktub dalam system keuangan, yaitu validasi. Padahal alur ini tahapan yang cukup krusial untuk melihat kembali hasil terjemahan agar terbebas dari kesalahan. Ketiga, hasil terjemahan perlu dilakukan pembacaan ulang secara komprehensif oleh seorang ahli (editor), namun dalam struktur anggaran kita, seorang editor dinilai dengan angka yang sangat kecil dibandingkan dengan beban pekerjaannya. Demikian juga dengan desain grafis dan lay out yang bertugas membuat desain cover dan iluminasi al-quran yang tidak termaktub dalam RKAACL.

Permasalahan di atas, belum dapat diatasi karena penerjemahan al-quran bahasa daerah belum memiliki standar biaya masukan lainnya (SBML) dan beberapa unsur pembiayaan belum tercover dalam RKAACL. Di sisi lain, tahapan validasi, editing, layout Al-Quran terjemah bahasa daerah harus segera dilaksanakan pada tahun anggaran 2025.

Oleh sebab itu, menjadi satu hal yang penting untuk dilakukan rasionalisasi pembiayaan. Dengan menggunakan tehnik analisis *Regulatory Impact Assesment* (RIA), maka dapat disimpulkan bahwa akar masalah ini adalah tidak adanya regulasi yang mengatur masalah pembiayaan unsur validasi, editing, layout dan desain grafis .

## C. Rekomendasi

REKOMENDASI	STRATEGI PENCAPAIAN	RENCANA AKSI
Membuat Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) pada unsur-unsur pembiayaan penerjemahan al-quran bahasa daerah	Menyusun hal-hal yang dibutuhkan dalam pembuatan SBML	1. Membuat naskah akademik 2. Membuat satuan pembiayaan
Menambah unsur-unsur pembiayaan dalam struktur anggaran penerjemahan al-quran bahasa daerah	Menyusun Rancangan Anggaran Biaya Penerjemahan yang memuat butir-butir yang belum tercover dalam rkaacl	Membuat ketentuan penambahan pembiayaan FGD, editor, layouter, desain grafis

## D. Penutup

Kegiatan penerjemahan al-quran bahasa daerah tidak akan mencapai hasil yang maksimal jika persoalan anggaran tidak dilakukan rasionalisasi. Dampak yang paling terlihat adalah hasil terjemahan banyak ditemukan kesalahan karena proses fgd, editing, lay out yang tidak maksimal.

